

TAJUK RENCANA

Nuansa Politik Gebrakan KPK

GEBRAKAN KPK yang menggeledah kantor Wali Kota Semarang dan sejumlah OPD mengundang kontroversi di tengah persiapan Pilkada 2024. Langkah KPK ini tentu saja dikaitkan dengan fenomena politik menjelang Pilkada. Tak pelak, tindakan KPK dinilai bukan murni hukum, melainkan sarat kepentingan politik. Benarkah ?

Hal ini telah dibantah Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi wartawan Minggu (21/7). Tessa mengatakan tak ada target partai tertentu, karena yang ditarget orang-orang yang diduga merugikan negara (KR 22/7). Sebelumnya, pada Rabu (17/7) KPK telah mengumumkan dimulainya penyidikan tiga kasus dugaan korupsi, meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Hemat kita, pernyataan Juru Bicara KPK bersifat normatif dan tidak menggambarkan kondisi riil dan kontekstual. Seperti diketahui, saat ini adalah masa-masa yang sangat sensitif menjelang Pilkada serentak di Indonesia. Sejumlah partai politik menggalang koalisi guna memajukan pasangan calon untuk berkontestasi dalam ajang Pilkada 2024. Konkretnya, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita yang merupakan kader PDIP telah memutuskan maju lagi dalam pemilihan Wali Kota Semarang karena telah mendapat restu dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.

Tindakan KPK yang ‘mengob-

ok-obok’ Pemkot Semarang tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses pencalonan Hevearita Gunaryanti. Hal inilah yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa lagkah lembaga antirasuah ini kental nuansa politiknya. Mengapa itu dilakukan KPK menjelang kontestasi Pilkada 2024 ? Apakah ini bukan sebagai upaya untuk menjegal langkah Hevearita Gunaryanti kembali menduduki jabatan Wali Kota Semarang ? Mungkin sulit dibuktikan, namun bisa dirasakan.

Berdasar informasi yang beredar di internal KPK, empat orang telah dicegah ke luar negeri, yakni Hevearita Gunaryanti dan suaminya, dan dua orang lagi dari swasta. Bahkan informasi yang beredar, Hevearita Gunaryanti telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

Kita tentu tak hendak mengintervensi kerja-kerja KPK, namun hanya mengingatkan jangan sampai ada tebang pilih dalam proses pidana, apalagi terkait dengan kepentingan politik tertentu. Bahwa semua didasarkan atas fakta hukum, semua orang sudah tahu. Namun penting kiranya mempertimbangkan konteks. Misalnya, mengapa penggeledahan dan pengusutan itu baru dilakukan sekarang, menjelang Pilkada 2024. Ini pertanyaan yang sangat wajar dan memang harus dijawab KPK.

Lebih dari itu, kita mendorong KPK bukan hanya menekankan aspek penindakan atas fenomena korupsi, melainkan juga aspek pencegahan, hal yang selama ini banyak terabaikan. Intinya, mencegah jangan sampai penyeleenggara negara melakukan korupsi, jadi bukan hanya menindak mereka yang terlibat korupsi. □d

SEPERTIGA atau sekitar 80 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak. Mereka aset bangsa paling berharga dan penentu masa depan yang harus mendapat perhatian. Investasi kebijakan untuk anak yang ditentukan hari ini, akan berdampak besar dan merupakan perjalanan panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Tidak bisa dinafikan, masa depan anak-anak Indonesia akan berjalan bersama dunia dan planet yang mengalami perubahan pesat. Kesalahan berinvestasi hari ini, dapat memberi dampak sangat fatal. Anak, tidak tumbuh sebagai generasi sehat dan siap berkompetisi dalam tatanan global.

Tahun 2024, Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) mengambil tema ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’. Mirisnya, pelbagai persoalan masih dihadapi anak-anak Indonesia. Problem yang sedang banyak dibicarakan seperti perundungan, pernikahan anak, anak bunuh diri, pornografi, kekerasan seksual, *stunting* dan sejenisnya. Sementara persoalan krusial yang membuat anak tidak terlindungi *pertama*, ketidaksetaraan yang mengakibatkan diskriminasi pendidikan, upah kerja bahkan kehidupan sosial yang bisa menyebabkan terperangkap dalam pelecehan seksual, perdagangan anak atau pernikahan anak. *Kedua*, kemiskinan dalam arti luas : miskin ekonomi, miskin akses, miskin relasi sosial.

PANDEMI Covid-19 yang mengharu biru, sudah berlalu. Tragisnya, dampak pandemi global tersebut hingga kini masih sangat terasa. Perubahan tata bisnis global, membuat banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sangat mungkin menghadirkan kemiskinan baru. Meski pemerintah mengungkap pelbagai kemajuan perekonomian, harus diakui Indonesia tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah di masa transisi dari Presiden Jokowi menuju pengambilan sumpah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa kaitannya dengan anak-anak Indonesia? Laporan resmi dan data angka ekonomi secara umum, mengungkap kemis-

Fadmi Sustiwi

kinan di Indonesia dapat dikatakan menurun. Ironisnya, ketimpangan justru menajam. Menjadi miris, karena anak adalah kelompok paling terdampak kemiskinan dibanding populasi lainnya. Laporan UNICEF 2023 mengungkap, mereka menyumbang 40% populasi rumah tangga miskin. Makin memprihatinkan ketika jender adalah



KR-JOKO SANTOSO

faktor penting lain yang sangat erat kaitannya dengan kondisi ketimpangan di Indonesia.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, 2019) menyatakan bahwa perempuan ‘lebih miskin dalam seluruh siklus kehidupan dan berada dalam posisi yang dirugikan di sekolah dan khususnya dunia kerja’. Miris! Meskipun tingkat kemiskinan antara anak lelaki dan perempuan tidak jauh berbeda, kemiskinan yang dialami anak dari keluarga dengan perempuan kepala keluarga adalah 34% lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga dengan lelaki sebagai kepala keluarga.

BAGI anak perempuan, dampak kemiskinan dan ketidaksetaraan lebih berisiko. Inilah problema serius bangsa.

Padahal, kondisi kesejahteraan anak saat ini adalah penanda penting bagi kemajuan Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 kelak, selaras Menuju Indonesia Layak Anak 2030. Sebelum kemudian mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang tentu memerlukan proses lebih panjang.

Perlu dicari solusi tepat mengentaskan anak-anak Indonesia dari ketidaksetaraan dan kemiskinan multidimensi. Semua ini harus menjadi tekad bersama, seluruh stakeholder negeri. Mengingat perjalanan mencapai Indonesia Emas bukan hanya selangkah dua, namun perlu waktu yang panjang dan pasti terjal. Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs/ Bappenas, Dra Nina Sardjunani (MI, 2021) bahkan menyebut, perjalanan ini dimulai sejak seorang anak perempuan menginjak usia remaja. Anak perempuan harus dipastikan sehat dengan status gizi yang baik, tidak kekurangan zat besi. Tetap terpantau kala memasuki tahap pernikahan dan kehamilan.

Sudahkah anak Indonesia terlindungi? Kita semua perlu introspeksi dan meningkatkan kepedulian pada anak ketika perundungan, *stunting*, kekerasan seksual, pernikahan anak, perdagangan anak, kemiskinan perempuan, ketidaksetaraan masih menghantui kenyamanan dan keamanan anak-anak. Untuk mengubah memang tidak mudah membalikkan tangan. Perlu tekad dan ketegasan. Selain persiapan, perencanaan serius, matang serta lebih ramah perempuan dari pengambil kebijakan. □d

**) Fadmi Sustiwi, jurnalis peraih Gender Award 2023.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPENS/IIUPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi, **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Haasan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklankr@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) • Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Mencari Makna dalam Evolusi Media dalam Komunikasi

ADA sebuah anekdot. Seorang pria, sebut saja Mukidi, yang tengah menyusuri jalanan seorang diri, tiba-tiba menemukan benda berkilat yang tak lain adalah sebuah cermin kecil. Mukidi memungutnya, sambil berharap itu adalah sebuah benda yang berharga, ia memperhatikannya. Tetapi tak lama ia membanting benda itu sambil mengerutu, iPantas saja dibuang, gambarnya jelek sekali!

Tak ada yang diajak bicara oleh Mukidi. Meski tanpa ada orang lain, dan seolah berbicara sendiri, sesungguhnya Mukidi tidak ‘sendiri.’Ada ‘orang lain’ yang diajaknya berbicara. Hasil berdialog dengan ‘orang lain’ itulah yang membantunya memberi makna ‘jelek’ pada apa yang dilihatnya.

Filsuf Rusia, Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975), menyebut ‘orang lain’ (*the other*) selalu ada dalam sebuah proses komunikasi, bahkan ketika ia tengah sendirian. Ketika berkomunikasi dengan diri sendiri (*intrapersonal communication*), seseorang akan membagi dua dirinya, yang satu akan mengajak bicara yang lainnya, meski tentu saja pembagiannya samar bahkan sering bertukar-tukar. Proses itulah yang disebutnya dialog. Dialog itu, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang disebut Bakhtin sebagai kesadaran (*consciousness*).

Mencari Makna

Kembali pada kisah Mukidi, ‘jelek’ adalah makna yang didapatkannya hasil dialog dengan dirinya sendiri. Makna ‘jelek’ juga didapat saat dialog dengan orang lain, dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Satu hal yang terlewati oleh Mukidi adalah soal cermin. Andai saja dia memiliki makna tentang sebuah cermin, mungkin dia tidak akan menyalahkan cermin itu dan orang yang membuangnya. Bisa jadi itu akan memberikannya kesadaran bahwa yang ‘jelek’ itu bukan cerminnya, tapi wajahnya sendiri.

Dengan hanya sebuah cermin saja sebagai medianya, pemaknaan sudah menjadi hal yang dinamis dan kompleks. Apalagi dengan kondisi saat ini ketika topik dialog dan medianya begitu banyak dan beragam. Bayangkan kita menonton televisi seharian, dari bangun tidur hingga kembali tertidur. Berapa banyak topik yang kita dialogkan dengan diri kita sendiri? Bangun tidur kita berdialog tentang pahala dan dosa kare-

Alip Yog Kunandar

na menonton acara dakwah. Setelah itu kita mengasihani nasib orang lain yang tertimpa bencana setelah menonton berita. Lalu kita memaki-maki artis yang gemar kawin-cerai di acara gosip. Kemudian membayangkan betapa indahnya masa muda saat menonton FTV, atau betapa nikmatnya menjadi bintang sepakbola yang dipuja banyak orang. Dan seterusnya.

Itu baru satu media yang kita konsumsi. Padahal, hari ini, kita adalah generasi yang berinteraksi dengan banyak media. Bukan hanya medianya, tapi juga ragam topik dan isinya. Informasi, penting atau tidak penting, diminta-tidak diminta, datang dan masuk menerpa kita. Bakhtin menggambarkan situasi seperti ini layaknya sebuah karnaval (*carnival*), sebuah metafora tentang dialogisitas di mana semua suara bisa dengar, bebas, dan tidak terkendali. Sebuah *polifony* (suara atau perspektif yang beragam), menurut Bakhtin dibutuhkan untuk mengarahkan kita pada sebuah makna. Tetapi jika suara itu tak terbendung (*information overload*), makna akan terlalu dinamis dan cepat berubah hingga menimbulkan kebingungan (*anxiety*).

Pada akhirnya, seringkali makna yang akan kita serap adalah makna yang gaungnya paling banyak terdengar di ruang gema (*echo chamber*) tempat kita berada. Jika di ruang gema tempat kita berada bergauga makna tentang ketidakadilan, maka menghajar maling yang tertangkap karena polisi selalu lambat bertindak bisa dianggap hal yang wajar. Atau bahkan kita anggap sudah seharusnya. Makna yang terdengar dalam ruang gema ini seringkali menyesatkan, bahkan bukan tidak mungkin dengan sengaja disesatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu pula (propagandik).

Memperkaya Perspektif
Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah membawa kita menjadi warga dunia (*global citizen*). Tidak memungkinkan kita untuk menarik dan mengurung diri

dalam tempurung dengan gema makna yang kita gaungkan, dengarkan, dan kita yakini sendiri kebenarannya. Tetapi kita juga tidak boleh hanyut dalam arus bahkan gelombang informasi yang memang sulit dibendung. Kita butuh pegangan dan juga pijakan yang kuat untuk menghadapinya. Akan lebih baik jika kita mampu mengendalikan arus itu.

Salah satu pegangan atau pijakan itu adalah ilmu. Ilmu yang baik didapatkan dari pendidikan yang baik pula. Pendidikan yang baik bukan sebuah *echo chamber* yang hanya membenarkan satu suara saja, tapi memperbanyak *polyphony* dan mendialogkan berbagai perspektif. Tetapi ilmu juga membutuhkan saringan moral sehingga makna tidak selalu ditimbang berdasarkan rasionalitas semata. Saringan moral itu adalah religiusitas yang bersumber dari ajaran agama.

Hari ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga meluncurkan Program Studi Media dan Komunikasi Program Magister (S2) untuk melengkapi Program Studi Ilmu Komunikasi Program Sarjana (S1) yang sudah berdiri sejak 2005. Tujuannya bukan hanya untuk membekali para akademisi/calon akademisi —juga praktisi— dengan perspektif keilmuan lebih lanjut, tetapi juga memperkuat saringan moral dengan nilai-nilai keagamaannya. □d

**) Alip Yog Kunandar, Dosen Ilmu Komunikasi, Fishum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Pojok KR

Menlu Retno Marsudi minta akhiri pendudukan di Palestina.
-- Dunia hanya mengecam tanpa tindakan.

KPK pastikan bebas muatan politik.
-- Sulit dibuktikan, tapi bisa dirasakan.

Belum terbentuk poros koalisi dalam Pilkada Yogya.
-- Tentunya bukan koalisi rakyat.

